

Evaluasi Implementasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur)

M. Farhan Nailal Umam (22116016)

Ir. Nia Kurniasih Pontoh, M.T, Mia Ermawati, M.T.

ABSTRAK

Salah satu bentuk penerapan dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan dilaksanakan dalam bentuk Kep. Dir DJCK No. 110/KPTS/DC/2016 Tentang Penetapan Lokasi Kota Tanpa Kumuh. Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebut menjadi dasar dalam penentuan lokasi kawasan yang ditetapkan mendapatkan program peningkatan kualitas permukiman kumuh salah satunya adalah program NUSP-2. NUSP-2 sebagai salah satu program pengentasan permukiman kumuh perlu dilakukan evaluasi sebagai bentuk penilaian hasil dari program yang telah dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan berfokus pada sisi dampak dengan lingkup dampak Fisik dan Non Fisik (Sosial dan Ekonomi) dan keberlanjutan dengan lingkup keberlanjutan ekonomi, sosial/masyarakat dan lingkungan, dimana evaluasi dampak menghasilkan nilai 0,692 atau berada pada kelas cukup berdampak sedangkan evaluasi keberlanjutan berada pada nilai 0,43 atau berada pada kelas kurang berkelanjutan/*sustainable*. Namun yang menjadi perhatian adalah berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, sisi yang memiliki pengaruh besar terhadap nilai evaluasi merupakan sisi yang bersinggungan langsung dengan program NUSP-2, dengan contoh untuk evaluasi dampak fisik memiliki pengaruh besar dibandingkan non fisik serta keberlanjutan sosial memiliki pengaruh terbesar dibandingkan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

Kata Kunci: Evaluasi, Kawasan Kumuh, Dampak, Keberlanjutan

Evaluation of the Implementation of the Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Program in Bandar Lampung City (Case Study: Kelurahan Kota Karang Raya, Teluk Betung Timur District)

M. Farhan Nailal Umam (22116016)
Ir. Nia Kurniasih Pontoh, M.T, Mia Ermawati, M.T.

ABSTRACT

One form of implementation of the mandate of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas is explicitly stated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 2 of 2015 concerning the National Medium Term Development Plan for 2015-2019 and implemented in the form of Kep. Director of DJCK No. 110/KPTS/DC/2016 concerning Determination of City Locations Without Slums. The decision of the Directorate General of Human Settlements became the basis for determining the location of the area that was determined to receive a program to improve the quality of slums, one of which was the NUSP-2 program. NUSP-2 as one of the slum settlement programs needs to be evaluated as a form of assessing the results of the programs that have been implemented. The evaluation carried out focused on the impact side with the scope of Physical and Non-Physical (Social and Economic) impacts and sustainability with the scope of economic, social/community and environmental sustainability, where the impact evaluation resulted in a value of 0.692 or was in the moderately impactful class, while the sustainability evaluation was at a value of 0.692. 0.43 or is in the less sustainable class. However, what is of concern is that based on the results of the analysis carried out, the side that has a large influence on the evaluation value is the side that is in direct contact with the NUSP-2 program, with examples for evaluation of physical impacts having a greater influence than non-physical and social sustainability having the greatest influence compared to sustainability environment and economy.

Keywords: Evaluation, Slums, Impact, Sustainability